

**UNIVERSITY'S ONE STOP ACCOUNTING SERVICE UNTUK UKM:
SOLUSI MENGATASI KEENGGANAN USAHA KECIL DAN
MENENGAH (UKM) MENGIMPLEMENTASIKAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP)**

Oleh :

Agus Faturokhman, Novita Puspasari, Margani Pinasti, Kiky Sri Rejeki
Universitas Jenderal Soedirman

ABSTRACT

Small and Medium Enterprises (SME) is the largest business sector at the same time the biggest contributor to the percentage of GDP for Indonesia. SMEs also absorb 90.12% of the total workforce in Indonesia. Accounting Standards Entities without Public Accountability issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) in 2011 aimed at regulating the financial reporting of SMEs so that they will be more systematic and they will get greater opportunities to develop their businesses. Several studies examining the implementation of SAK ETAP by SMEs shows virtually the majority of SMEs did not apply SAK ETAP in financial reporting. This study aims to find out what the cause of SMEs in Banyumas not apply SAK ETAP. Once known its causes, this study looks for the best solution so that SMEs can apply SAK ETAP. The method used is qualitative data collection through in-depth interviews and literature studies. There are nine participants representing SMEs and the agency that houses in this study. The results showed that SMEs in Banyumas did not apply SAK ETAP because of the following: lack of skill in accounting, lack of funds to hire qualified staff in accounting, no time to study accounting, and differences in the fundamental characteristics between the entrepreneur/businessman and accountant. Solutions offered once the implications of this research are the Universities establish One Stop Accounting Service for SMEs.

Keywords: *SME, Accounting, SAK ETAP.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi tulang punggung perekonomian di berbagai negara. Di Uni Eropa misalnya, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menguasai sekitar 99% entitas usaha dan menjadi lapangan pekerjaan bagi lebih dari 100 juta orang (Ialomitanu, 2010). Tilley dan Parrish (2011) menyatakan bahwa kewirausahaan lewat UMKM memiliki potensi untuk membuat pembangunan berkelanjutan dan mengurangi kemiskinan di negara berkembang, termasuk Indonesia. Lalu bagaimana perkembangan UMKM di Indonesia?

Pada tahun 2013, UKM berkontribusi sebesar 60,34% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pada tahun 2011, angka unit bisnis UKM mencapai 55,206,444 (Purwati, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Tahun 2012 UMKM memiliki porsi 98,82% dari total jumlah entitas usaha di Indonesia. UMKM juga menyerap 90,12% tenaga kerja dari total angkatan kerja di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Gupta et al. (2014) bahwa UMKM turut berkontribusi untuk PDB secara signifikan.

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa UMKM adalah sektor yang vital bagi perekonomian Indonesia. Sebagai sektor yang vital dan menjadi pondasi bagi perekonomian nasional, sudah sepatutnya Pemerintah Indonesia mendukung dan memfasilitasi UMKM untuk berkembang. Jika tidak didukung dan difasilitasi, kasus kegagalan UMKM seperti yang terjadi di Amerika Serikat dapat terjadi di Indonesia. Sebesar 75% bisnis UMKM baru gagal dalam tiga tahun terakhir di Amerika Serikat. Penyebab kegagalan terbesar adalah akuntansi dan pajak (Pleis, 2014). Di Uni Eropa, salah satu permasalahan terbesar yang dihadapi oleh UKM adalah masalah administrasi akuntansi dan perpajakan (Ialomitanu, 2010).

Menurut Magginson et al., (2000), informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi UMKM. Akuntansi tidak dapat dipisahkan dari segala bentuk bisnis, termasuk UMKM. Namun justru akuntansi adalah hambatan terbesar yang dihadapi oleh pemilik UMKM saat ini (Pleis, 2014). Tujuan dari adanya akuntansi untuk UMKM adalah untuk akuntabilitas yang lebih baik, pengukuran laba yang benar dan yang terpenting, membantu manajemen meraih tujuannya (Nwobu et al., 2015). Namun, sebagian besar pemilik UMKM bahkan tidak mengetahui akuntansi dasar meskipun mereka mengetahui bahwa akuntansi penting bagi kelangsungan usaha mereka (Pleis, 2014).

Di Indonesia, Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk mendukung dan memfasilitasi perkembangan UMKM. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan berbagai produk hukum yang berfungsi untuk mengatur dan menstimulasi pertumbuhan UMKM. Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai wadah akuntan profesional di Indonesia pun tidak mau ketinggalan berkontribusi untuk UMKM. Karena karakteristiknya yang berbeda dengan korporasi besar, maka pada Tahun 2011, dikeluarkanlah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Standar akuntansi sangat penting bagi UMKM agar mereka dapat mengelola bisnisnya secara profesional dan berkembang lebih besar lagi.

Sayangnya, dari berbagai penelitian yang dilakukan (Senoaji, 2014, Adriani et al., 2014, Auliyah, 2012, dan Armando, 2014) menunjukkan bahwa SAK ETAP tidak efektif bagi UMKM. Menurut Adriani et al. (2014), kegagalan penerapan SAK ETAP pada UMKM karena adanya faktor internal berupa kurangnya pemahaman, kedisiplinan dan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan faktor eksternal karena kurangnya pengawasan dari *stakeholders* yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Hasil senada juga ditemukan dalam penelitian Senoaji (2014) yang menyatakan bahwa SAK ETAP tidak efektif karena kurangnya SDM yang kompeten dalam bidang akuntansi. SAK ETAP yang diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan pencatatan keuangan UMKM ternyata tidak banyak membantu. Hal ini sekaligus mengindikasikan bahwa antara para penyusun standar dan praktisi akuntansi profesional dan pebisnis UMKM belum terdapat kesamaan sudut pandang mengenai kebermanfaatan akuntansi, sehingga pada tataran implementasi standar terdapat *gap* antara pemahaman penyusun standar dan pebisnis UKM.

Menurut Pleis (2014), salah satu penyebab adanya *gap* antara akuntan profesional dan akuntansi dunia nyata adalah karena kurikulum akuntansi yang ada saat ini tidak mempersiapkan

akuntan masa depan untuk membantu UMKM. Sebagian besar mata kuliah akuntansi saat ini terkait dengan korporasi besar dan mahasiswa didorong untuk memiliki spesialisasi di salah satu bidang tertentu (keuangan, audit, atau manajerial). Menurut Gupta et al. (2014), saat ini, pendidikan akuntansi dihadapkan pada persoalan mengurangi disonansi antara teori dan praktek. *American Accounting Association* (AAA) pada Tahun 1984 telah menyatakan bahwa disaat profesi lain turut berubah dari waktu ke waktu, institusi pendidikan akuntansi gagal berevolusi secepat praktek profesionalnya. Kajian AAA ini juga turut diperkuat oleh Siegel et al. (2010).

Universitas, dalam hal ini jurusan akuntansi sebagai pencetak para akuntan dan sebagai gudang para akademisi yang memiliki pemahaman mengenai standar akuntansi harus terlibat dalam membantu UKM. Menurut Pleis (2014), pendidikan akuntansi di perguruan tinggi hendaknya menciptakan akuntan profesional untuk membantu pemilik UKM dengan permasalahan-permasalahan akuntansi. Bantuan akuntansi yang dimaksudkan adalah dalam hal pajak, pengendalian biaya, penentuan harga, penganggaran, penggajian dan urusan-urusan dengan bank. Sedangkan menurut Nwobu et al. (2015), beberapa manfaat jasa akuntansi adalah untuk meningkatkan akuntabilitas operasi bisnis, mengurangi kecurangan dan mengukur laba dengan benar.

Penelitian ini awalnya ingin mengobservasi apa penyebab UKM-UKM yang ada di Kabupaten Banyumas dan sekitarnya tidak menerapkan SAK ETAP. Setelah diketahui penyebabnya, peneliti kemudian memformulasikan solusi yang dapat diaplikasikan agar UKM dapat menerapkan SAK ETAP. Solusi tersebut adalah dengan membuat *University's One Stop Accounting Service* untuk membantu UKM yang ada di Banyumas dan sekitarnya dalam hal administrasi pelaporan keuangan dan pajak.

Tinjauan Pustaka

Akuntansi untuk Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Dalam UU No. 20/2008, yang dimaksud usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan, atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana yang dimaksud didalam Undang-Undang, yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Menurut Swasono (2009), UKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Jumlah UKM hingga 2011 mencapai sekitar 52 juta. UKM di Indonesia sangat penting bagi ekonomi karena menyumbang 60% dari PDB dan menampung 97% tenaga kerja (Purwati, 2014). Namun, akses UKM ke lembaga keuangan masih sangat terbatas yaitu hanya 25% atau 13 juta pelaku UKM yang mendapat akses ke lembaga keuangan. Salah satu permasalahan yang membuat UKM gagal adalah karena akuntansi dan pajak (Pleis, 2014).

Sedangkan menurut Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan

atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Berikut tabel kriteria usaha berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Tabel 1. Kriteria Usaha Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008

No.	Uraian	Kriteria	
		Aset	Omset
1.	Usaha Mikro	Maks 50 juta	Maks 300 juta
2.	Usaha Kecil	>50 juta-500 juta	> 300 juta- 2,5 miliar
3.	Usaha Menengah	>500 juta- 10 miliar	>2,5 miliar-5 miliar

Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dengan tujuan untuk mempermudah pelaporan keuangan bagi perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini dianggap cukup sederhana dan tidak akan menyulitkan penggunaannya. SAK ETAP mulai diberlakukan pada akhir tahun 2011. Oleh sebab itu bagi perusahaan yang telah memutuskan akan menggunakan SAK ETAP sudah harus mengadakan penyesuaian sejak tahun 2010. Penggunaan PSAK ini harus konsisten untuk tahun-tahun berikutnya. Bagi perusahaan yang sudah memutuskan untuk menggunakan PSAK Umum dalam penyajian laporan keuangan, maka untuk selanjutnya tidak boleh merevisi kebijakannya ke SAK ETAP.

Dalam praktiknya, SAK ETAP tidak selalu menjadi rujukan bagi UKM. SAK ETAP dianggap terlalu kompleks bagi sebagian besar UKM (Tanugraha, 2012, Auliyah, 2012).. Menurut Andriani et al. (2014), kegagalan penerapan SAK ETAP diakibatkan kurang terampilnya sumber daya manusia dan kurangnya pengawasan dari *stakeholder* yang berkepentingan dengan laporan keuangan. Menurut Armando (2014), SAK ETAP hanya mengakomodir pelaporan UKM untuk Level 4 yang cukup kompleks. Sementara sebagian besar UKM di Indonesia adapada Level 1, 2, dan 3 yang memerlukan standar akuntansi yang lebih sederhana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Menurut Molelong (2007), penelitian kualitatif adalah penelitian yang mampu memberikan pemahaman tentang fenomena yang sedang terjadi secara menyeluruh dengan penggambaran deskriptif dalam bentuk bahasa dan kata-kata. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan data berupa wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan bentuk wawancara semi-struktur guna menemukan permasalahan secara terbuka dan mendalam. Sugiyono (2012) mengemukakan bahwa wawancara semi-struktur adalah wawancara yang dilakukan dengan instrumen namun pertanyaan lebih terbuka dan dapat berkembang tanpa harus terpaku pada instrumen yang telah ditetapkan guna mendapatkan jawaban yang lebih dalam, detail dan mengeksplorasi seluruh

persepsi dan kondisi informan. Peneliti akan bertanya berdasarkan dengan instrumen yang telah disiapkan kemudian instrumen tersebut berkembang untuk mengeksplorasi jawaban yang diberikan informan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Responden penelitian ini adalah perwakilan-perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Banyumas (KADIN) dan perwakilan-perwakilan UKM di Banyumas. Perwakilan KADIN menjadi responden karena dianggap sebagai lembaga yang menaungi UKM yang ada di Banyumas. KADIN dapat melihat persoalan yang dihadapi UKM-UKM di Banyumas secara general. Pemilihan responden penelitian perwakilan UKM didasarkan pada beberapa kriteria diantaranya: usaha harus mewakili bentuk usaha jasa, dagang dan manufaktur, selain itu juga mewakili *bankable* dan *non-bankable*. Alasan pemilihan UKM yang *bankable* adalah biasanya UKM *bankable* membuat laporan keuangan untuk keperluan bank (Purwati, 2014). Peneliti ingin meneliti tentang kendala selama proses pelaporan keuangan. Pemilihan UKM *non-bankable* adalah karena biasanya UKM *non-bankable* membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peneliti ingin meneliti tentang alasan mengapa UKM tidak membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.

PEMBAHASAN

Peneliti mewawancarai delapan responden yang mewakili karakteristik yang telah ditetapkan sebelumnya: lembaga asosiasi pengusaha, *bankable*, *non-bankable*, jenis usaha dagang, manufaktur dan jasa. Satu orang mewakili lembaga asosiasi pengusaha (KADIN), empat UKM mewakili usaha dagang, tiga UKM mewakili usaha jasa, dan satu UKM mewakili usaha manufaktur. Dari ketujuh UKM tersebut, lima UKM *bankable* dan tiga UKM *non-bankable*. Berikut daftar responden penelitian:

Tabel 1. Daftar Responden Penelitian

No.	Nama UKM	Jenis Usaha	<i>Bankable/Non-Bankable</i>
1.	La Pizza	Dagang	<i>Non-bankable</i>
2.	Auto 168	Jasa	<i>Bankable</i>
3.	Hulala Ice Cream	Dagang	<i>Non-bankable</i>
4.	Orlando Salon	Jasa	<i>Bankable</i>
5.	Lembaga Bahasa IEC	Jasa	<i>Bankable</i>
6.	Wijaya (Rental mobil, fotokopi, selular).	Jasa dan Dagang	<i>Bankable</i>
7.	Omah Batik Banyumasan	Dagang	<i>Non-bankable</i>
8.	Kamar Dagang dan Industri Banyumas (KADIN)	-	-
9.	PT. Sung Chang Indonesia	Manufaktur	<i>Bankable</i>

Dari delapan UKM yang menjadi responden, hanya satu UKM yang memiliki pencatatan keuangan yang sesuai dengan SAK ETAP yaitu PT. Sung Chang Indonesia. Permintaan *stakeholders* (pemilik, rekanan dan pemerintah) membuat PT. Sung Chang Indonesia harus membuat laporan keuangan yang memadai. Pemilik PT. Sung Chang adalah warga negara Korea Selatan yang tidak selalu berada di Indonesia, sehingga untuk mengontrol bisnisnya, ia memerlukan laporan keuangan yang rinci. Untuk kepentingan pembayaran pajak, maka

diperlukan juga laporan keuangan yang sesuai standar. Dalam menyusun laporan keuangannya, PT. Sung Chang memiliki satu manajer keuangan dan satu staf keuangan. Kualifikasi pendidikan manajer keuangan adalah S1 Manajemen, sedangkan staf keuangan adalah D3 Akuntansi.

Empat UKM lainnya yang *bankable* ternyata tidak mengetahui tentang SAK ETAP. Mereka menyusun laporan keuangan dengan mencontoh laporan keuangan UKM lain yang sudah ada. Alih-alih meminta bantuan akuntan profesional, sebagian besar pemilik mengaku mengerjakan laporan keuangannya sendiri atau meminta karyawan mengerjakannya. Alasan tidak meminta bantuan akuntan profesional adalah karena tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa atau lembaga apa. Alasan lainnya, dengan laporan keuangan-laporan keuangan yang telah dibuat tanpa bantuan akuntan profesional, bank bisa tetap mengucurkan kreditnya. Pencatatan keuangan yang dibuat mencakup kas masuk dan keluar, piutang dan utang.

Tiga UKM lainnya yang *non-bankable* telah membuat laporan keuangan sederhana. Sebagian besar membuat laporan keuangan yang berisi kas masuk, keluar dan biaya operasional. Hanya IEC yang memiliki Laporan Laba Rugi, dan memiliki akun depresiasi aset tetap. Namun akun depresiasi tidak diisi selama bertahun-tahun dengan alasan kesulitan menghitung depresiasi. Ketiga UKM *non-bankable* lainnya hanya membuat laporan sebatas arus kas masuk dan keluar dikurangi dengan biaya operasional. Alasan tidak membuat laporan keuangan sesuai standar adalah karena tidak tahu dan karena tidak terlalu membutuhkannya. Ketiga pemilik UKM *non-bankable* merasa belum terlalu membutuhkannya karena tidak atau belum berurusan dengan bank. Selain itu membuat laporan keuangan sesuai standar dinilai rumit dan menghabiskan sumber daya, baik tenaga maupun uang. Namun, mereka berkeinginan untuk mengembangkan usahanya dengan meminjam uang ke bank di masa yang akan datang. Sehingga mereka mulai berpikir untuk memperbaiki sistem pencatatannya agar sesuai standar yang berlaku.

Hasil wawancara mendalam dengan perwakilan KADIN Banyumas memperkuat hasil wawancara dengan UKM-UKM sebelumnya. Menurut perwakilan KADIN, lebih dari 90% UKM yang ada di Banyumas dan sekitarnya menjalankan bisnis *by instinct* dan bukan *by system*. Tidak heran jika mereka tidak terlalu peduli dengan sistem akuntansi bisnisnya. Pengusaha UKM baru merasakan perlunya sistem akuntansi ketika mereka akan berurusan dengan bank. Hal ini sesuai dengan penelitian Pleis (2014) yang menyatakan bahwa banyak pemilik UKM tidak mengetahui dan tidak memahami pentingnya sistem akuntansi dasar. Menurut perwakilan KADIN, selain keterbatasan keterampilan administrasi keuangan, pemilik bisnis UKM juga terbatas dalam hal waktu jika ingin belajar tentang akuntansi dasar. Jika menggunakan jasa pihak ketiga, seperti staf keuangan atau akuntan profesional, mereka merasa bahwa biayanya terlalu mahal.

Masalah utama berupa kurangnya pengetahuan dan kemampuan akuntansi, ketiadaan waktu untuk membuat laporan yang sesuai standar, standar akuntansi yang dianggap rumit dan ketidakmampuan membayar staf yang kompeten di bidang akuntansi sebenarnya sama dengan masalah yang diutarakan penelitian-penelitian sebelumnya (Auliyah, 2012., Andriani et al., 2014., Senoaji, 2014., Armando, 2014., Pleis, 2014., Chabra dan Pattanayak, 2014., Nwobu, 2015). Dari berbagai penelitian di beberapa negara terkait UMKM yang dilakukan beberapa tahun belakangan ini jika disimpulkan adalah standar akuntansi yang dibuat oleh pemerintah untuk UMKM tidak efektif. Mengapa tidak efektif? Karena tidak dipergunakan oleh sebagian besar pelaku UMKM. Kemudian muncul pertanyaan kembali, mengapa tidak digunakan oleh sebagian besar UMKM? Maka masalah-masalah utama yang dipaparkan di awal paragraf ini yang muncul.

Pelaku bisnis UMKM sebenarnya menyadari pentingnya membuat laporan keuangan yang sesuai standar. Namun hasil penelitian Chabra dan Pattanayak (2014) yang diperkuat kembali oleh penelitian ini menyatakan bahwa hambatan terbesar dalam penerapan standar akuntansi untuk UMKM adalah waktu. Pelaku bisnis UMKM tidak memiliki waktu untuk membuat laporan keuangan yang baik. Sementara mereka tidak mampu juga untuk membayar staf akuntansi yang kompeten di bidangnya.

Gupta et al. (2014) memotret fenomena *gap* akuntan dan UKM di India. Output penelitiannya adalah metode *customized accounting education*, yaitu dengan merancang pembelajaran akuntansi terkustomisasi (sesuai kebutuhan pengguna). Gupta mengajukan pelatihan akuntansi jangka pendek untuk Akuntansi UKM yang diberi nama *Accounting Lab Portable Kiosk* sebagai pusat informasi, pendidikan dan pelatihan akuntansi satu pintu. Target audiens dari pelatihan ini adalah mahasiswa, peneliti, praktisi, akademisi, wirausahawan UKM dll. Model kios akuntansi yang diajukan Gupta di India dapat didirikan di sekolah-sekolah, kampus, pusat penelitian, perpustakaan publik, dll.

Model pelayanan akuntansi seperti yang diajukan Gupta et. al (2014) di India sebenarnya dapat diterapkan di Indonesia dengan melakukan beberapa penyesuaian. Pertama, pihak yang mendirikan pelayanan akuntansi satu pintu ini adalah pihak kampus (universitas) atau yang peneliti sebut sebagai *University's One-Stop Service Accounting* untuk UMKM. Hal ini tentunya sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Indonesia yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada UMKM di wilayahnya masing-masing juga merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat. Tidak seperti lembaga konsultan swasta yang memungut bayaran sesuai jasa yang diberikan, pelayanan akuntansi satu pintu yang diberikan pihak kampus kepada UMKM menarik bayaran sukarela. Dosen maupun mahasiswa akuntansi dapat terlibat dalam pelayanan akuntansi satu arah ini.

Kedua, tempat didirikannya pelayanan akuntansi satu pintu ini adalah di lingkungan kampus, sehingga memudahkan dosen dan mahasiswa akuntansi untuk aktif terlibat. Pelaku UMKM yang ingin meminta bantuan jasa dapat datang ke kampus. Hal ini sekaligus untuk menghapuskan *stereotype* bahwa kampus adalah menara gading yang tidak terjamah masyarakat luas.

Ketiga, jasa yang diberikan dapat berupa jasa pelatihan, pendampingan maupun pembuatan laporan keuangan. Jasa pelatihan dapat diberikan kepada UMKM yang ingin melakukan sendiri proses pelaporan keuangannya di masa yang akan datang. Pendampingan dilakukan kepada UMKM dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan jasa pembuatan laporan keuangan dilakukan untuk UMKM yang tidak mau dan tidak mampu membuat laporan keuangannya sendiri. Selain laporan keuangan, jasa pelayanan akuntansi satu pintu juga dapat membantu UMKM dalam hal perpajakan.

KESIMPULAN

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yang diharapkan membantu bisnis UKM agar lebih sistematis ternyata belum digunakan oleh sebagian besar UKM di Indonesia. Padahal, menurut Magginson et al. (2000), untuk mencapai keberhasilan, bisnis kecil memerlukan sistem akuntansi. Alasan tidak diterapkannya SAK ETAP pada UKM-UKM di Banyumas dan sekitarnya adalah karena dianggap rumit, memakan waktu dan biaya.

Universitas dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi-nya memiliki kewajiban untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat. Masyarakat disini dapat termasuk bisnis UKM yang merupakan sektor bisnis dengan pelaku usaha terbesar di Indonesia. Universitas dapat membuat pusat pelayanan akuntansi satu pintu (*university's one-stop accounting service*) untuk membantu UKM dengan kesulitan pelaporan keuangan dan perpajakannya.

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan yang diharapkan akan dapat disempurnakan oleh penelitian-penelitian selanjutnya. Penelitian selanjutnya sebaiknya meneliti mengenai jasa-jasa akuntansi apa saja yang dibutuhkan oleh UKM secara mendetail sehingga dapat dipersiapkan modul yang sesuai dengan kebutuhan UKM. Penelitian selanjutnya juga dapat mengobservasi sudut pandang *stakeholders* UKM mengenai apa yang mereka harapkan dari para pelaku UKM.

Implikasi dari penelitian ini ada dua. Pertama, kampus-kampus yang ada di Indonesia dapat membuat semacam pusat pelayanan akuntansi satu pintu untuk membantu UKM-UKM yang ada di daerahnya. Kedua, organisasi profesi dan pembuat standar sebaiknya turut mendukung usaha kampus untuk membantu UKM dengan cara memberikan modul-modul atau fasilitas pendukung lain yang dapat memperlancar kegiatan pusat pelayanan akuntansi satu pintu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, L., A. T. Atmadja., N. K. Sinarwati. 2014. *Analisis Penerapan Pencatatan Keuangan Berbasis SAK ETAP Pada UMKM*. E-journal Universitas Pendidikan Ganesha Vol 2 No. 1.
- American Accounting Association. 1986. *The Bedford Report-Future Accounting: Preparing for the Expanding Profession*. Available at www.aaahq.org/AECC/future/index.htm diakses pada 15 Juni 2015.
- Ainsworth, P. 2001. *Changes In Accounting Curricula: Discussion And Design*. Accounting Education, 10(3): 279-297.
- Armando, Zipo Rahman. 2014. *Eksplorasi dan Remodelling Akuntansi Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK)*. Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya.
- Auliyah, Iim Ma'rifatul. 2012. *Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP Pada UKM Kampung Baik di Sidoarjo*. Artikel Ilmiah STIE Perbanas Surabaya.
- Badan Pusat Statistik. 2014. www.bps.go.id diakses pada 19 Oktober 2014.
- Chabra, K. S., J. K. Pattanayak. 2014. *Financial Accounting Practices Among Small Business: Issues and Challenges*. The IUP Journal of Accounting Research & Audit Practices. Vol XIII No. 3: 37-55.
- Gupta, V, K., P. K. Singh., V. Sriranga. 2014. *A Framework for Dissemination of Accounting Education*. Academic of Business Research Journal.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*.
- Ialomitanu, Gheorge. 2010. *A Few Considerations on Simplifying The Fiscal and Accounting Systems of Small and Medium Enterprises*. Bulletin of the Transilvania University of Braşov • Vol. 3 (52) – 2010 Series V: Economic Sciences
- Molelong, L. J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mohamed, E. K. A. 2003. *Accounting Knowledge And Skills And The Challenges Of A Global Business Environment*. Managerial Finance, 29 (3).
- Nwobu, O, S. O. Faboyede., a. T. Onwuelingo. 2015. *The Role of Accounting Services in Small and Medium Scale Business in Nigeria*. Journal of Accounting, Business and Management, Vol 22 No. 1: 55-63.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 25 tentang Akuntan Beregister Negara.
- Pleis, Letitia Meier. 2014. *A New Graduate Accounting Course for the Small Business Accountant*. Business Education Innovation Journal. Vol. 6 No. 2: 70-73.
- Purwati, A.S., I, Suparlinah dan N. K. Putri. 2014. *The Use of Accounting Information in the Business Decision Making Process on SME in Banyumas Region, Indonesia*. Economy Transdisciplinary Cognition, Vol 17 No. 2: 63-75.
- Senoaji, Aditya Rizal. 2014. *Gap analysis penerapan SAK ETAP Pada Penyusunan Laporan Keuangan UKM di Kabupaten Kudus*. Skripsi Universitas Diponegoro.
- Siegel, G., J. E. Sorensen., T. Klammer. S. Richtermeyer. 2010. *The Ongoing Preparatiom Gap in Accounting Education: A Call to Action*. Management Accounting Quarterly (Spring) Vol 11 No. 3: 41-52.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Swasono, Sri Edi. 2009. *Keparipurnaan Ekonomi Pancasila: Menegakkan Ekonomi Pancasila*. Penerbit Universitas Gadjah Mada.
- Tanugraha, Jevon. 2012. *Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Pada PT TDMN*. Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 1, No. 3.
- Tilley. H dan F. Perrish. 2006. *Small Industries in Developed Countries*. Australia: Wombat Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

